

**TESIS**  
**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PESISIR**  
**DI PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR**  
**(Studi Kasus di Kecamatan Sangkarrang tahun 2020)**

***POLITICAL PARTICIPATION OF COASTAL COMMUNITIES***  
***IN THE MAKASSAR MAYORAL ELECTION***  
***(Case Study in the Sangkarrang District, 2020)***

**ANDI MARDAYA**  
**E032192007**



**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PESISIR  
DI PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR  
(Studi Kasus di Kecamatan Sangkarrang tahun 2020)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI MARDAYA**

**E032192007**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **28 Februari 2024**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Rahmat Muhammad, M.Si**  
**Nip. 19700513 199702 1 002**

**Ketua Program Studi  
Magister Sosiologi,**

**Dr. Sakaria S.Sos, M. Si**  
**Nip. 19690130 200604 1 001**

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si**  
**Nip. 19680715 199403 1 004**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,**

**Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si,**  
**Nip. 19750818 200801 1 008**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Mardaya

NIM : E032192007

Program Studi : Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 November 2023

Yang menyatakan



Andi Mardaya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kepada Allah SWT atas kehadiran-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan tesis ini. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan terhadap fenomena Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir dalam Pemilihan Wali Kota Makassar, dan penulis tertarik untuk mengungkapkan bentuk partisipasi dan motifnya. Meskipun menghadapi beberapa kendala dalam penyusunan tesis, berkat bantuan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan tesis ini.

Dalam tulisan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas kesehatan dan ilmu yang diberikan, serta kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan sosial dan spiritual. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua Ayah **Andi Syarifuddin MS** dan Ibu **(Almh) Andi Husnaeni AM**, saudara **(Andi La Tenri Ruwa, Andi Mulatauwe, Andi Dala Ulang, Andi Rewata, Andi Buldi Saisar)**, dan semua pihak yang memberikan dukungan berharga untuk tetap konsisten dalam menjalani perkuliahan dan menyelesaikan studi. Bantuan, dukungan, dan masukan dari berbagai pihak juga turut diapresiasi Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. Phil Sukri, SIP, M.Si** Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin.

3. Bapak **Dr. Sakaria, S.Sos, M.Si** sebagai Ketua Program Studi S-2 Sosiologi atas bimbingan dan bantuannya dalam proses penyelesaian studi.
4. Bapak **Dr. Rahmat Muhammad, M.Si** selaku Ketua Komisi penasihat, Bapak **Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si** sebagai Anggota Komisi Penasihat, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing.
5. Bapak **Prof. Hasbi Marissangan, M.Si, Ph.D, Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si, Dr. Sawedi Muhammad, M.Si** yang telah memberikan masukan dan saran pada proses penyelesaian tesis ini sampai selesai.
6. **Seluruh staf akademik** Pascasarjana Fisip Unhas yang membantu banyak dalam hal-hal administratif, terima kasih atas bantuannya.
7. **Seluruh Dosen** di Pascasarjana Sosiologi Universitas Hasanuddin yang telah berbagi banyak pengetahuan, pengalaman dan motivasi.
8. **Seluruh informan** yang telah berkontribusi pada penelitian tesis ini. Terima kasih atas bantuan ta semua.
9. **Kak Armini Puspita, Kak Hasriyanti, Kak Nirwana**, selaku ipar yang selalu mendukung penyelesaian tesis ini.
10. **Andi Tilka Aya Dea Pati, Andi Marsaniga Alrayatis, Andi Zain Madjombea, Andi Fihayatin, Andi Iskala Bau Kati, Andi Affan Muhammad Syaggaf, Andi Ali Mappanganro, Andi Bau Batari**, Selaku Keponakan yang selalu menemani penulis bercanda tawa di saat penyelesaian tesis ini.

11. **Kerabat OIYA** serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tesis ini, meskipun telah diusahakan sebaik mungkin. Hal ini semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan kekhilafan dari penulis, namun penulis berharap semoga tesis ini ada manfaatnya bagi peneliti lainnya yang ingin mengetahui bentuk dan motif partisipasi politik masyarakat pesisir khususnya di pemilihan Walikota Makassar. Amin.

Makassar, 18 Maret 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andi Mardaya', written in a cursive style.

**Andi Mardaya**

## ABSTRAK

**ANDI MARDAYA.** Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir di Pemilihan Wali Kota Makassar (Studi Kasus di Kecamatan Sangkarrang tahun 2020). (dibimbing oleh : Rahmat Muhammad dan Suparman Abdullah).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) bentuk partisipasi politik pada masyarakat pesisir di pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020 dan (2) motif partisipasi politik pada masyarakat pesisir di pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deksriptif. Lokasi penelitian di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penentuan informan dengan *Purposive sampling* yang berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari penyelenggara, simpatisan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan agama serta tokoh perempuan yang mengetahui bentuk dan motif partisipasi politik masyarakat pesisir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Wali Kota Kota Makassar tahun 2020 diselenggarakan pada 9 Desember 2020 dengan melibatkan jenis partisipasi politik konvensional. Proses pemilihan melibatkan empat pasangan calon dan mencakup serangkaian kegiatan seperti sosialisasi, kampanye, pemilihan suara, dan penghitungan suara. Pada tahap sosialisasi menunjukkan partisipasi rendah karena bersamaan dengan waktu nelayan melaut, begitupun saat dilakukan kampanye. Partisipasi politik dalam bentuk pemilihan suara menunjukkan tingkat yang tinggi, khususnya di kalangan masyarakat pesisir karena pengaruh dari punggawa dan tokoh masyarakat yang menjadi tim pemenang, bahkan dalam perhitungan suara sangat tinggi karena animo masyarakat dalam melihat hasil pemilihan. Selanjutnya Motif partisipasi politik terbentuk Motif partisipasi politik didorong oleh faktor sosial dan ekonomi serta tradisi dan budaya. Faktor sosial seperti relasi aktor dan kuasanya untuk memaksa masyarakat pesisir agar secara sukarela menggunakan hak pilihnya, termasuk ketakutan akan kehilangan pekerjaan jika tidak berpartisipasi, bahkan di dalam masyarakat, mereka akan dikucilkan. Pada saat yang sama, faktor ekonomi menyangkut rasionalitas mereka yang memandang kemungkinan menerima bantuan pangan pokok dan uang sebagai imbalan atas pilihan mereka. Sedangkan dari faktor tradisi dan budaya, motivasi untuk berpartisipasi dianggap sebagai norma budaya, namun rasa tanggung jawab terhadap komunitas atau kelompok sosial tertentu dapat mendorong individu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dianggap sebagai bagian tradisi dan kebudayaannya.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Motif Politik dan Masyarakat Pesisir

## ABSTRACK

**ANDI MARDAYA.** *Political Participation of Coastal Communities in the Makassar Mayoral Election (Case Study in the Sangkarrang District, 2020).* (supervised by: Rahmat Muhammad and Suparman Abdullah).

*This research aims to analyze (1) the forms of political participation in coastal communities during the 2020 Makassar Mayoral Election and (2) the motives behind political participation in coastal communities during the 2020 Makassar Mayoral Election. The research methodology employed is qualitative with a descriptive type. The study is conducted in the Sangkarrang Islands Subdistrict, utilizing data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and literature review. Informant selection is done through purposive sampling, consisting of 12 individuals, including organizers, sympathizers, youth leaders, community and religious leaders, as well as female figures familiar with the forms and motives of political participation in coastal communities.*

*The research findings indicate that the Mayor Election in Makassar City in 2020 was held on December 9, 2020, involving conventional political participation. The election process included four pairs of candidates and encompassed a series of activities such as socialization, campaigning, voting, and vote counting. During the socialization phase, low participation was observed due to coinciding with the time when fishermen were at sea, as well as during the campaign period. Political participation in the form of voting showed a high level, particularly among coastal communities influenced by local leaders and influential figures who supported the winning team. Moreover, the vote counting process exhibited high enthusiasm from the community in observing the election results. Furthermore, the motif of political participation is shaped by social and economic factors, as well as tradition and culture. Social factors, such as the relationships of actors and their power to compel coastal communities to voluntarily exercise their voting rights, include fears of job loss if they do not participate, and the possibility of being marginalized within the community. Simultaneously, economic factors involve their rational view of the possibility of receiving essential food aid and money as rewards for their choices. Regarding tradition and culture, the motivation to participate is considered a cultural norm, yet a sense of responsibility toward a specific community or social group can drive individuals to actively participate in activities regarded as part of their tradition and culture.*

*Keywords: Political Participation, Political Motives, and Coastal Communities*

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tindakan Sosial.....	13
B. Partisipasi Politik .....	17
C. Masyarakat Pesisir .....	33
D. Penelitian Terdahulu.....	35
E. Kerangka Konseptual .....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Tipe Dan Jenis Penelitian .....	40
D. Teknik Penentuan Informan.....	41
E. Sumber Data .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
G. Instrumen Penelitian.....	44
H. Teknik Analisis Data .....	45
I. Keabsahan Data.....	46
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN .....	48
A. Kondisi Geografis .....	48
B. Kondisi Pemerintahan .....	49
C. Penduduk.....	50
D. Sosial dan kesejahteraan rakyat.....	51
E. Hasil pemilihan wali kota di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.....	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	54
A. Informan Penelitian.....	54
B. Bentuk Partisipasi Politik .....	60
C. Motif Partisipasi Politik.....	79
BAB VI PENUTUP .....	93
A. Simpulan .....	93
B. Saran .....	94
Daftar Pustaka .....	96

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Hal</b>
1	Infografis pemilih di Kecamatan Sangkarrang tahun 2020.....	5
2	Pemilih di Kecamatan Sangkarrang tahun 2020.....	6
3	Bentuk partisipasi politik .....	24
4	Penelitian terdahulu.....	35
5	Informan Penelitian.....	42
6	Teknik Pengumpulan Data.....	43
7	Wilayah administratif Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.....	50
8	Hasil pemilihan walikota di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.....	53
9	Informan penelitian.....	60
10	Partisipasi pemilih ke TPS.....	71

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Hal</b>
1	Hasil pemilihan walikota tahun 2020.....	7
2	Kerangka konseptual .....	38
3	Peta wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang .....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
1	Dokumentasi kegiatan.....	100
2	Pedoman wawancara.....	101
3	Perijinan.....	103

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Abraham Lincoln (Reynolds, 2001) mengatakan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga berarti sistem pemerintahan demokrasi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang keputusannya diambil berdasarkan suara terbanyak. Sehingga salah satu syarat utama terciptanya demokrasi adalah pemilihan umum karena masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin mereka secara langsung sesuai dengan pilihan masing-masing.

Dalam Undang-Undang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu yaitu UU No. 7 Tahun 2017 berdasarkan UU tersebut Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Pemilihan umum merupakan gambaran bagi pemerintahan yang demokrasi di Indonesia yang karakteristiknya adanya partisipasi dari warga negara dalam kehidupan politik. Partisipasi politik merupakan keikutsertaan

warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, Memahami Ilmu politik, 2007).

Kota Makassar pada tahun 2020 melakukan pemilihan wali kota secara langsung yang sebelumnya pada tahun 2018 yang hanya satu pasangan saja dan akhirnya dimenangkan oleh kotak kosong. Kotak kosong memperoleh suara sebanyak 300.795, sedangkan calon tunggal memperoleh suara sebanyak 264.245. Total perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar mencapai 565.040 suara. Perolehan suara antara kotak kosong dengan calon tunggal sebanyak 36.898 suara. Perolehan suara kotak kosong memperoleh suara Pilkada Makassar 2018 sebanyak 53,23 persen dan perolehan suara calon tunggal Appi-Cicu yang diusung 10 partai besar memperoleh suara sebanyak 46,77 persen (Kompas, 2018)

Partisipasi politik merupakan aspek utama dalam tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas modernisasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi karena partisipasi politik berpengaruh terhadap jalannya suatu pemerintahan. suatu pemilihan umum atau kepala daerah diperpengaruhi oleh pengambilan keputusan masyarakat kepada pasangan salah satu pasangan calon yang terpilih (Husain, 2021). Setiap masyarakat mereka dalam pemilihan umum. Masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada pilihan masyarakat sebagai pemilih, tidak hanya itu partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan.

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem perpolitikan bangsa Indonesia dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan yang mulai dari masa orde baru sampai pada reformasi (Upe, 2008). Namun disadari reformasi sering di maknai sebagai era yang lebih demokratis. Sebagai proses dari perubahan politik, makna pemilihan umum atau kepala daerah selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan yang besar agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *check and balances* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pemilihan umum baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati atau walikota dan wakil bupati atau wakil wali kota dapat menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, *legitimate*, dan peka terhadap kepentingan masyarakat. Partisipasi politik merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat mendasar dalam proses demokrasi.

Saat ini partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemilu partisipasi politik masyarakat memiliki kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu partisipasi politik juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Dalam penelitian ini yang menjadi focus analisis adalah partisipasi politik masyarakat pesisir di Kota Makassar tahun 2020.

Secara geografis masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yaitu suatu kawasan yang berada di antara wilayah darat dan laut. Seperti masyarakat di pedesaan, masyarakat pesisir atau nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi. Masalah-masalah tersebut misalnya: (1) kemiskinan kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, (2) keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga memengaruhi dinamika usaha, (3) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, (4) kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, (5) degradasi sumber daya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan (6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi, 2006). Begitupun yang terjadi di masyarakat pesisir kota Makassar yang secara administrative berada di Kecamatan Sangkarrang mengalami masalah demikian.

Dalam pemilihan umum partisipasi politik masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan biasanya terbilang masih rendah yang disebabkan oleh beberapa faktor sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan yang membuat masyarakat lebih mementingkan pekerjaan ketimbang mengurus masalah politik, dan kurangnya pendidikan masyarakat juga mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi. Misalnya apabila pelaksanaan pemilihan umum dilakukan

pada saat nelayan melaut, maka mereka akan lebih mementingkan pergi mencari nafkah dibandingkan menunda melaut untuk ikut memberikan suara dalam pemilihan (Damsar, 2010). Tetapi hal ini terbantahkan pada pemilihan wali kota Makassar yang dimana tingkat partisipasi di Kelurahan Barrang Lompo sangat tinggi yang mencapai 70 persen, terbalik di Kecamatan yang berada di jantung perkotaan seperti Wajo dan Ujung pandang justru hanya mencapai 45-50 persen tingkat partisipasi politiknya. Hal ini yang memotivasi penulis untuk melakukan kajian mendalam terkait fenomena tingginya partisipasi pemilih di wilayah pesisir.

Kecamatan Sangkarrang merupakan kecamatan yang berada di wilayah laut dan terdiri atas 3 (tiga) kelurahan. Berikut table infografis pemilih di Kecamatan Sangkarrang tahun 2020:

**Tabel 1**  
**Infografis pemilih di Kecamatan Sangkarrang tahun 2020**

No	Kelurahan	TPS	Pemilih		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Kodingareng	15	1.613	1.647	3.260
2	Barrang Lompo	14	1.672	1.784	3.456
3	Barrang Caddi	14	1.590	1.599	3.189
	<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>4.875</b>	<b>5.030</b>	<b>9.905</b>

Sumber : (KPU Makassar, 2020)

Berdasarkan table diatas wajib pilih di Kepulauan Sangkarrang berjumlah 9.905 yang tersebar di 43 tempat pemilihan suara di 3 (tiga) pulau. Rata-rata wajib pilih berjumlah tiga ribuan pemilih yang mayoritas adalah pemilih perempuan. Sementara berikut table pemilih yang melakukan hal pilihnya pada pemilihan walikota Makassar tahun 2020 berikut:

**Tabel 2**  
**Pemilih di Kecamatan Sangkarrang tahun 2020**

No	Kelurahan	DPT	Pemilih yang ke TPS	Tingkat Partisipasi (%)
1	Barrang Caddi	3.189	2.265	71,02
2	Barrang Lompo	3.456	2.159	62,47
3	Kodingareng	3.260	2.197	67,39
		9.905	6.621	rata <sup>2</sup> = 66,96

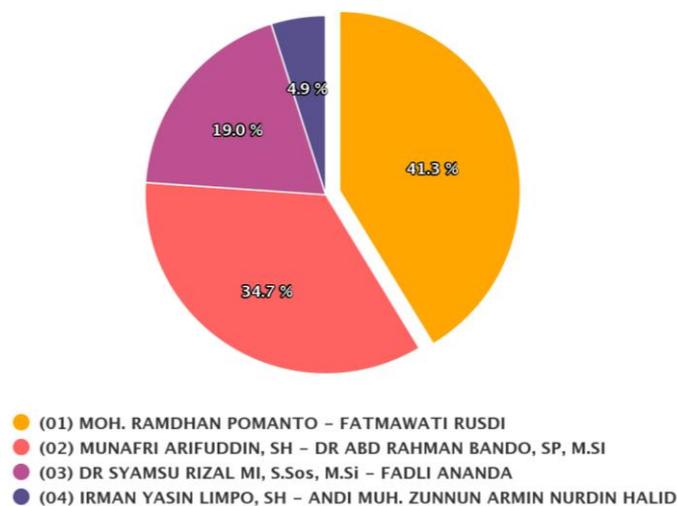
Sumber : (KPU Sulawesi Selatan, 2022)

Berdasarkan table diatas partisipasi pemilih sebesar 66,96 persen sementara pemilih yang tidak memberikan hak pilihnya sebesar 33,04 persen. Berdasarkan hal tersebut menarik dikaji kenapa angka partisipasi di masyarakat pesisir melebihi angka partisipasi secara keseluruhan di Kota Makassar yang hanya sebesar 59,66 persen.

Partisipasi politik masyarakat pesisir seiring berkembangnya zaman mengalami peningkatan dalam menentukan calon pemimpin mereka. Lambat laun pengetahuan tentang pentingnya memberikan suara dalam pemilu semakin meningkat. Walaupun tidak banyak masyarakat yang memahami siapa yang mereka pilih. Tetapi mereka tidak langsung menyalahkan hak pilih mereka sebagai warga negara. Ada alasan tersendiri mengapa menggunakan hak pilih dalam pemilu tahun 2020 sehingga terjadi perbedaan tingkat partisipasi pada pemilu tahun 2018 sebelumnya yang dimenangkan oleh kotak kosong sebesar 0,7 persen. Pilkada Makassar 2013, tingkat partisipasi pemilih berada di angka 59,94%. sedangkan pada 2018 partisipasi pemilih turun sekitar dua poin menjadi 57,02% atau hanya sekitar 584.406

yang menggunakan hak pilihnya dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1,01 juta (Media Indonesia, 2018).

Secara umum hasil pemilihan walikota Makassar tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan Danny Pomanto – Fatmawati Rusdi dengan 43,1 persen dan mengalahkan 3 (tiga) pasang calon lainnya yang bisa dilihat pada gambar berikut:



Sumber : (KPU Sulawesi Selatan, 2022)  
Gambar. 1 Hasil pemilihan walikota tahun 2020

Secara umum tingkat partisipasi politik pemilih di Kota Makassar hanya 59,66 persen dimana Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo yang tertinggi partisipasi pemilihnya yakni 88,79 persen. Yang menjadi perhatian Kelurahan Barrang Lompo masuk di 10 (sepuluh) besar kelurahan yang memiliki tingkat partisipasi politik tinggi yaitu 74 persen yang merupakan salah satu wilayah masyarakat pesisir yang akan diteliti. Sementara terendah merupakan daerah perkotaan di Kecamatan Wajo dan Ujung Pandang dengan rata-rata tingkat partisipasi dengan 45-50 persen (Detik News, 2021).

Berdasarkan pemilihan wali kota, Bentuk Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir seperti menggunakan hak suaranya di TPS, mengikuti kampanye, sosialisasi atau kegiatan yang diadakan oleh calon, dan masyarakat pesisir menjadi salah satu tim sukses dari salah satu calon wali kota. Tetapi hal itu bisa bertambah seiring kajian dan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Sehingga dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat khususnya pada wilayah pesisir yang secara geografis masuk di Kecamatan Sangkarrang yang terdiri dari Kelurahan Barrang Lompo dan Kelurahan Barrang Caddi dan Kelurahan Kodingareng. Lalu apakah yang menjadi factor pendorong yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Syaifudin S. Kasim, Peribadi tahun 2021 dengan judul “Partisipasi Politik Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Studi Sosiologi Politik Pada Masyarakat Suku Bajo di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi)” menemukan bahwa partisipasi politik terhadap pemilihan kepala daerah dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pengetahuan politik, faktor sosial ekonomi, pengaruh partai politik dan tim kampanye, pengaruh figur calon pilkada dan pengaruh *money politics*. Partisipasi politik dengan ambil bagian dalam proses partisipasi politik lainnya seperti menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai, menjadi tim sukses salah satu pasangan calon dan lain sebagainya. Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik. Dalam penelitian ini akan dikaji lebih

mendalam bagaimana bentuk partisipasi pemilih dan tidak secara khusus mengkaji bagaimana prosesnya. Bentuk partisipasinya secara konvensional seperti menjadi tim sukses atau tim pemenang salah satu pasangan calon pada pemilihan walikota Makassar tahun 2020.

Penelitian Betrix Priscilla Fermamdez (2020) dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020” menemukan bahwa Factor-faktor yang mempengaruhi turunnya tingkat partisipasi politik masyarakat Timor Tengah Utara ialah sosial ekonomi, tingkat pengetahuan politik,serta faktor penghambat yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Sementara dalam penelitian ini akan dianalisis lebih mendalam bentuk partisipasi masyarakat pesisir.

Pada penelitian Hasimu dan Achmad Abdi Amsir (2019) dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan di Desa Pulo Madu Kabupaten Kepulauan Selayar” menemukan bahwa Masyarakat nelayan Desa Pulo Madu sangat berinisiatif dalam ikut serta pada pemilihan umum. Masyarakat tidak mengenal kata Golput, yang mereka tahu adalah ikut berpartisipasi memberikan suaranya pada pemilihan umum dikarenakan tuntutan beberapa hal seperti karena uang, harapan pada perbaikan hidup, karena keluarga atau karena untuk melunasi hutang. Pandangan dan sikap politiknya sangat ditentukan oleh fakta yang terjadi di lapangan sehingga wajah politik tergantung dari pada perilaku para politikus. Sementara penelitian yang akan dilakukan bagaimana motif partisipasi politik masyarakat pesisir.

Penelitian Regina Singestecia, Eko Handoyo, Noorocmat Isdaryanto (2018) dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal” menemukan bahwa Partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam beberapa bentuk, yaitu kegiatan diskusi politik informal dan pemberian suara. Dari beberapa bentuk partisipasi pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik yang paling banyak dilakukan dengan pemberian suara pada Pilkada tahun 2014 mencapai 95,58%. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat Tionghoa terdiri dari kesadaran politik, pengaruh media massa, pendidikan yang tinggi dan status sosial ekonomi. Sementara dalam penelitian ini tidak melihat secara etnis tetapi masyarakat pesisir secara umum dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan walikota Makassar tahun 2020.

Penelitian Swastiani Dunggio, Iskandar N. Yantu (2021) dengan judul “Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Di Tengah Pandemi Covid 19” menemukan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid19 di Kecamatan Bulango Selatan, sudah dapat dikatakan baik. Perilaku pemilih yang ada masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan dalam Pilkada banyak dipengaruhi oleh faktor daerah asal calon dalam pilkada di tahun 2020 hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh masyarakat. Selain faktor daerah asal calon, masyarakat melihat visi-misi yang disampaikan oleh pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Bone Bolango untuk bisa memperoleh informasi serta menetapkan pilihan masyarakat terhadap pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango. Sementara penelitian ini berfokus pada tindakan sosial pemilih dan motifnya dalam partisipasinya di pemilihan walikota Makassar tahun 2020.

Sehingga penelitian ini akan menganalisis bagaimana bentuk dan motif partisipasi politik pada masyarakat pesisir di pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020. Sehingga penulis mengangkat judul “**Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir di Pemilihan Wali Kota Makassar (Studi Kasus di Kecamatan Sangkarrang tahun 2020)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik pada masyarakat pesisir di pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020?
2. Bagaimana motif partisipasi politik pada masyarakat pesisir di pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk partisipasi politik pada masyarakat pesisir di pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020.

2. Untuk menganalisis motif partisipasi politik pada masyarakat pesisir di pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian sosiologi politik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk menformulasikan kebijakan pemerintah terkait pemilihan kepala daerah.

3. Manfaat Metodologis

Manfaat metodologis dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu tambahan referensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan kajian ilmu pengetahuan tentang partisipasi politik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindakan Sosial**

Alasan seorang individu atau kelompok berpartisipasi dalam pemilihan umum adalah adanya tindakan sosial. Hal itu akan dikaitkan dengan konsep tindakan sosial. Weber (Roth & Claus, 1978) melihat sosiologi sebagai sebuah studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan sosial manakala tindakan itu ditujukan pada orang lain. Tindakan adalah ketika atau sejauh aktor mengenakan suatu makna subjektif kepada perilakunya—terbuka atau tertutup, pasif atau aktif. Dan tindakan itu dikategorikan sebagai “sosial” sejauh makna subjektifnya mempertimbangkan perilaku orang lain dan memang diorientasikan dalam rentang tindakan atau perilaku. Tindakan sosial kepada perilaku masa lalu, masa kini atau yang diharapkan dari orang lain.

Max Weber (Wirawan, 2012) mengatakan individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial

merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan social.

Max Weber (Wirawan, 2012) dalam memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang, berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau *in order to motive*. Bagi peneliti perilaku (behavior) sangat sulit meyakinkan bahwa suatu perbuatan mempunyai arti subyektif dan diarahkan kepada orang lain, apabila tidak mencoba menginterpretasikan tindakan si aktor. Dalam artian mendasar, sosiolog harus berusaha memahami motif dari tindakan si aktor. Sehingga Weber menyarankan dua macam guna memahami motif tindakan si aktor, yaitu: 1) melalui kesungguhan. 2) mencoba menyelami pengalaman si aktor. Peneliti sebaiknya menempatkan dirinya dalam posisi si aktor juga mencoba memahami sesuatu seperti yang difahami oleh actor (Ritzer, 2010).

Tindakan sosial menurut Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat "membatin" atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Selain itu, tindakan sosial dapat juga berupa tindakan perulangan yang disengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa, atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu (Ritzer, 2010).

Terdapat tiga unsur dalam tindakan sosial yaitu agen (agents)/aktor, pergerakan (vehicles) dan makna (meaning). Agen merupakan aktor dan objek dari tindakan sosial yang berperilaku, sedangkan yang lainnya merupakan objek dari perilaku tersebut. Pergerakan merupakan kondisi fisik, gerakan atau kegiatan dari agen yang mempunyai makna bagi mereka. Sedangkan makna adalah elemen dari tindakan sosial (Jacky, 2015).

Berdasarkan konsep dasar tindakan sosial dan antar hubungan sosial Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi :

1. Tindakan manusia, dimana menurut aktor mengandung makna yang subyektif. Hal ini mencakup berbagai tindakan nyata.
2. Tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif.
3. Tindakan yang melingkupi pengaruh positif dari suatu situasi, dimana tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.
4. Tindakan tersebut diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
5. Tindakan tersebut memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu (Ritzer, 2010).

Max Weber (Ritzer, 2010) mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti subjektif tersebut kedalam empat tipe. Atas dasar rasionalitas

tindakan sosial, membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe, semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami yaitu :

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*)

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.

2. Tindakan Rasional Nilai (*Werk Rational*)

Tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut.

3. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.

4. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Kedua tipe tindakan yang terakhir sering hanya menggunakan tanggapan secara otomatis terhadap rangsangan dari luar. Karena itu tidak termasuk kedalam jenis tindakan yang penuh arti yang menjadi sasaran penelitian sosiologi. Namun demikian pada waktu

tertentu kedua tipe tindakan tersebut dapat berubah menjadi tindakan yang penuh arti sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dipahami. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial, suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain (individu liannya).

## **B. Partisipasi Politik**

Pada sub bab ini akan dibahas defenisi partisipasi politik, bentuk partisipasi politik dan motif partisipasi politik.

### **1. Defenisi Partisipasi Politik**

Konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Latin, yaitu kata *pars* yang berarti bagian dan *capere (sipasi)*, yang artinya mengambil. Bila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Sementara dalam bahasa Inggris, yaitu kata *part* yang berarti bagian, jika dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi *to participate* atau *to participation* yang bermakna turut ambil bagian atau mengambil peranan. jadi, partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara (Efriza, 2012).

Partisipasi politik adalah penggabungan dua konsep, yaitu partisipasi dan politik, maka partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan (*power*),

kewenangan (*authority*), kehidupan publik (*publik life*), pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict dan conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*) dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*). Partisipasi juga dimengerti sebagai ikut serta yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan publik, baik yang memiliki dimensi politik maupun nonpolitik, dapat terselenggarakan dengan baik karena adanya peran serta atau keikutsertaan warga (Damsar, 2010).

Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Di dalam masyarakat yang masih terkebelakang, urusan pemerintahan dan politik dianggap sebagai hanya urusan satu golongan elit tertentu. Umumnya para petani, buruh, dan pedagang kecil merupakan golongan penduduk yang kurang menyadari bahwa kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Sebaliknya mereka juga dapat mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah yang berpihak kepadanya dengan kekuatan politik. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan (Miaz, 2012).

Samuel Huntington dan Nelson (Damsar, 2010) mengemukakan partisipasi politik merupakan kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-

pribadi, yang dimaksudkan untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Menurut Miriam (Miaz, 2012) partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek, dan efek tersebut dinamakan *political efficacy*. Pada terminologi sosiologi politik, dianggap bahwa lebih banyak masyarakat turut berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil. Karena itu, makin banyak partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan demokrasi semakin lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dimaksud, ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik.

Pengertian partisipasi politik dalam perspektif sosiologi politik, terdapat dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* yang dikutip oleh McClosky (Miaz, 2012) yaitu partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui hal mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan umum. Definisi lain

berdasarkan *Handbook of Political Sciences* yang dikutip Nie dan Verba (Miaz, 2012) mengungkapkan partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Rush dan Althoff (Ranjabar, 2016, hal. 240) menyatakan bahwa partisipasi politik dapat dipahami berdasarkan akibat yang ditimbulkannya terhadap sistem politik. Tingkatan partisipasi ini memiliki dampak yang besar pada suatu sistem politik tertentu, sementara tingkatan lain mungkin memiliki dampak yang lebih kecil atau bahkan tidak memiliki dampak sama sekali pada sistem lainnya. Ada beberapa tingkatan partisipasi politik, termasuk menduduki jabatan politik atau administratif, mencari jabatan politik atau administratif, keanggotaan aktif dalam suatu organisasi politik, keanggotaan pasif dalam suatu organisasi politik, keanggotaan aktif dalam suatu organisasi semu politik, keanggotaan pasif dalam suatu organisasi semu politik, partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam bidang politik, dan memberikan suara dalam pemilihan. Tingkatan partisipasi politik ini mencerminkan kapasitas partisipan dalam berpartisipasi politik. Semakin tinggi tingkatan yang diemban oleh seseorang atau kelompok, semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya. Namun, perlu diperhatikan bahwa tingkatan partisipasi politik yang lebih tinggi tidak selalu berarti jumlah partisipan yang lebih banyak; sebaliknya, semakin

tinggi tingkat partisipasi, semakin mengerucut jumlah orang yang terlibat dalam tingkatan tersebut.

## 2. Bentuk partisipasi politik

Ada berbagai bentuk partisipasi politik yang dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non konvensional. Bentuk bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Cohen dan Uphoff (Miaz, 2012) adalah sebagai berikut: a) partisipasi dalam pembuatan keputusan; b) partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan; c) partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan d) partisipasi dalam evaluasi. Menurut Sulaiman (Miaz, 2012) merumuskan bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut: a) partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; b) partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana; c) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; dan d) partisipasi dalam bentuk dukungan. Sedangkan jenis-jenis partisipasi politik menurutnya adalah: a) partisipasi pikiran (*psychological participation*); b) partisipasi tenaga (*physical participation*); c) partisipasi pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*); d) partisipasi keahlian (*participation with skill*); d) partisipasi barang (*material participation*); dan e) partisipasi uang/dana (*money participation*).

Menurut Samuel Huntington dan Nelson (Efriza, 2012) membatasi beberapa hal yaitu:

- a. Partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Dalam hal ini, tidak memasukkan komponen-komponen subjektif seperti pengetahuan tentang politik, keefektifan politik, tetapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana berbagai sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk tindakan politik.
- b. Partisipasi politik adalah warga negara biasa, bukan pejabat-pejabat pemerintah. Hal ini didasarkan pada pejabat-pejabat yang mempunyai pekerjaan profesional di bidang itu, padahal justru kajian ini pada warga negara biasa.
- c. Kegiatan politik adalah kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Kegiatan yang dimaksudkan misalnya membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk menggagalkan keputusan, bahkan dengan cara mengubah aspek-aspek sistem politik. Dengan itu protes-protes, demonstrasi, kekerasan bahkan bentuk kekerasan pemberontakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan dapat disebut sebagai partisipasi politik.
- d. Partisipasi juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal.
- e. Partisipasi politik dilakukan langsung atau tidak langsung, artinya langsung oleh pelakunya sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi

ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan ke pemerintah.

Sementara merujuk pada konsep partisipasi Samuel Huntington dan Nelson (Damsar, 2010) mengusulkan dua konsep partisipasi yaitu:

- a. Partisipasi otonomi yaitu menunjukkan partisipasi yang dilakukan secara sadar, tanpa tekanan dan sukarela.
- b. Partisipasi mobilisasi yaitu menunjukkan partisipasi yang dilakukan secara tidak sadar, ada tekanan atau unsur paksaan, sekecil apapun itu.

Samuel Huntington dan Nelson (Damsar, 2010) menemukan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti berikut:

- a. Kegiatan pemilihan, mencakup suara juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan.
- b. Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Seperti, adanya kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif tertentu.

- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e. Tindakan kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan suatu bentuk partisipasi politik dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dijelaskan oleh Gabriel A. Almond (Damsar, 2010) terdiri atas dua bentuk, yaitu:

- a. Partisipasi Politik Konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern. Bentuk Partisipasi politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dan dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar serta tidak berupa kekerasan yaitu adanya pemungutan suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.
- b. Partisipasi Politik Non Konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

- c. Secara khusus bentuk partisipasi politik Konvensional dan Non Konvensional dibedakan pada table berikut:

**Tabel 3**  
**Bentuk partisipasi politik**

No	Konvensional	Non Konvensional
1	Pemungutan suara	Pengajuan petisi
2	Diskusi politik	Demonstrasi
3	Kegiatan kampanye	Konfrontasi
4	Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Mogok
5	Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	Tindak kekerasan politik terhadap benda (perusakan, pemboman, pembakaran)

Sumber : (Damsar, 2010)

Menurut Paige (Miaz, 2012) sekurang-kurangnya terdapat empat macam bentuk partisipasi politik, pertama apabila kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tinggi maka partisipasi sangat tinggi. Keduanya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik juga rendah. Ketiga, sikap militant atau radikal yaitu apabila kesadaran politik tinggi tapi kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik adalah rendah. Terakhir, kesadaran politik rendah tapi kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik adalah tidak aktif atau nol.

### 3. Motif politik

Partisipasi politik pada hakikatnya merupakan tindakan yang suka rela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Karena itu, partisipasi politik terkait erat dengan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat atau pemilih sehingga melahirkan motif politik. Menurut Nimmo

(Miaz, 2012) keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini.

- a. Peluang resmi, artinya ada kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik karena didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara.
- b. Sumber daya sosial, artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumberdaya sosial dan sumberdaya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik. Berkaitan dengan perbedaan demografis, terdapat juga perbedaan dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, agama, dll.
- c. Motivasi personal, artinya motif yang mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi. Motif ini bisa sengaja atau tidak disengaja, rasional atau tidak emosional, diilhami psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar, dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.

Dalam partisipasi politik terdapat faktor yang dapat meningkatkannya. Partisipasi politik menyangkut motif orang yang membuatnya ambil bagian yaitu :

- a. Sengaja atau tak sengaja

Beberapa warga negara mencari informasi dan berhasrat menjadi berpengetahuan, memengaruhi suara legislator atau mengarahkan kebijaksanaan pejabat pemerintahan.

b. Rasional atau emosional

Orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu, yang dengan teliti mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian memilih yang paling menguntungkan di pandang dari segi pengorbanan dan hasilnya disebut bermotivasi rasional.

c. Kebutuhan psikologis atau sosial

Bahwa kadang-kadang orang memproyeksikan kebutuhan psikologis mereka pada objek-objek politik. Misalnya, dalam mendukung pemimpin politik karena kebutuhan yang mendalam untuk tunduk kepada autoritas, atau ketika memproyeksikan ketidacukupannya pada berbagai kelas "musuh" politik yang dipersepsi-minoritas, negara asing atau politikus dari partai oposisi.

d. Diarahkan dari dalam atau dari luar

Perbedaan partisipasi politik yang dengan motivasi batiniah dan motivasi sosial untuk berpartisipasi politik.

e. Berpikir atau tanpa berpikir

Setiap orang berbeda dalam tingkat kesadarannya ketika menyusun tindakan politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi aktif dari tindakan seseorang dan perkiraan konsekuensi tindakan itu terhadap dirinya dan orang lain (Efriza, 2012).

Entus Sukaria (2005, hal. 53-54) dalam bukunya dinamika strategi pembangunan "good governance," terdapat beberapa alasan mengapa seseorang memilih untuk berpartisipasi dalam politik. Meskipun mungkin

bentuk partisipasi antara individu satu dengan yang lain serupa, namun makna partisipasi dapat sangat berbeda bagi setiap anggota masyarakat. Terdapat keterkaitan erat antara makna partisipasi dan motivasi, di mana setiap motif dapat berdiri sendiri atau terkait satu sama lain. Kelima motif tersebut mencakup dimensi psikologi, sosial, keagamaan, ekonomi, dan politik.

- a. Motif psikologis melibatkan perasaan puas, dorongan untuk meraih prestasi, atau perasaan telah mencapai sesuatu, merupakan sebagian dari motivasi psikologis seseorang dalam berpartisipasi. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi juga berarti memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri dan aspirasinya. Dengan demikian, melibatkan diri dalam aktivitas politik dapat memberikan kepuasan pribadi dan memberdayakan individu untuk meraih pencapaian atau hasil yang diinginkan.
- b. Motif sosial memiliki dua sisi, yaitu untuk memperoleh status sosial dan untuk menghindari sanksi sosial. Seseorang akan dengan sukarela berpartisipasi jika keikutsertaannya dapat meningkatkan status sosialnya. Di sisi yang negatif, individu mungkin merasa "terpaksa" berpartisipasi karena takut akan mendapat sanksi sosial, seperti menjadi tersisih atau dikucilkan oleh masyarakat. Dengan demikian, motif sosial mencakup dorongan untuk memperoleh pengakuan dan posisi yang dihormati dalam komunitas, sekaligus upaya untuk menghindari potensi penolakan atau hukuman sosial.

- c. Motif keagamaan didasarkan pada keinginan untuk beribadah secara ikhlas. Motif partisipasi ini dalam konteks pembangunan memiliki orientasi yang bersifat spiritual, dengan tujuan untuk mencapai kehidupan spiritual yang lebih baik di akhirat. Dalam hal ini, partisipasi dalam kegiatan pembangunan dipandang sebagai bentuk pengabdian yang dilakukan dengan tujuan akhirat, di luar aspek materi atau duniawi. Motif keagamaan mengarah pada keinginan untuk memenuhi nilai-nilai dan ajaran agama sebagai dorongan utama dalam berpartisipasi dalam upaya pembangunan.
- d. Motif ekonomi melibatkan cara berpikir secara ekonomi, yaitu mempertimbangkan untung dan rugi. Motivasi ekonomi dapat mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu. Jika partisipasi tersebut dianggap menguntungkan bagi dirinya atau perusahaannya, individu cenderung melanjutkan partisipasi tersebut untuk memastikan bahwa usaha atau bisnisnya tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, pertimbangan ekonomi, seperti potensi keuntungan atau penghematan, dapat menjadi motivasi utama dalam menentukan tingkat partisipasi seseorang dalam berbagai kegiatan atau inisiatif pembangunan.
- e. Motif politik memiliki dasar utama pada keinginan untuk memperoleh kekuasaan. Oleh karena itu, tingkat partisipasi seseorang atau kelompok akan ditentukan oleh sejauh mana kekuasaan yang dapat diperoleh melalui partisipasi tersebut. Semakin besar potensi

kekuasaan yang dapat diperoleh, semakin besar pula motivasi individu atau kelompok tersebut untuk berperan serta dalam aktivitas politik. Dalam konteks ini, keikutsertaan dalam kegiatan politik dipandang sebagai sarana untuk memperoleh, mempertahankan, atau meningkatkan posisi kekuasaan.

#### 4. Alasan Partisipasi politik

Di dalam realitas kehidupan politik, banyak warga negara yang enggan atau tidak peduli sama sekali terhadap kegiatan politik. Beberapa alasan dapat dijelaskan untuk menjelaskan fenomena ini. Menurut Myron Weiner (Ranjabar, 2016, hal. 229), ada 5 (lima) faktor yang dapat menjadi pemicu meningkatnya partisipasi dalam proses politik, yakni sebagai berikut :

- a. Modernisasi di berbagai aspek kehidupan telah mengakibatkan peningkatan tuntutan masyarakat untuk terlibat dalam ranah kekuasaan politik. Proses modernisasi terjadi saat penduduk di wilayah perkotaan, seperti buruh, pedagang, dan para profesional, merasa memiliki kemampuan untuk memengaruhi jalannya nasib mereka melalui keterlibatan dalam setiap kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, dengan keyakinan yang telah terbentuk, mereka semakin mendesak untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.
- b. Transformasi struktur kelas sosial memiliki dampak signifikan pada lahir dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik publik dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur kelas sosial ketika perubahan sosial berlangsung. Dengan berjalannya

waktu, perubahan tersebut membentuk kelas-kelas sosial baru yang tidak pernah ada dalam masyarakat tradisional sebelumnya. Salah satu contohnya adalah munculnya kelas pekerja baru dan perluasan serta perubahan kelas menengah selama proses industrialisasi dan modernisasi.

- c. Pengaruh dari kelompok intelektual dan media massa modern sangat besar. Melalui peran kaum intelektual dan media komunikasi modern, gagasan demokratisasi dan partisipasi telah tersebar di negara-negara yang baru merdeka, bahkan sebelum mereka mengalami tingkat modernisasi dan industrialisasi yang signifikan. Dua institusi ini, yaitu kaum intelektual dan media massa modern, telah menjadi pendorong utama untuk mendorong gelombang partisipasi politik publik.
- d. Adanya konflik antara kelompok pemimpin politik dapat menjadi pendorong peningkatan partisipasi dalam masyarakat. Dalam kasus sebelumnya, dampak konflik di antara pemimpin politik terlihat dalam konteks kelas menengah pada abad ke-16, 17, dan 18, di mana terjadi perjuangan melawan kaum aristokrat. Konflik tersebut telah mendorong lahirnya partisipasi politik publik, di mana kelas menengah aktif terlibat dalam upaya melawan kebijakan dan dominasi kaum aristokrat, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat partisipasi politik dalam masyarakat.
- e. Ekspansi peran pemerintah dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan mendapatkan kritik yang pada akhirnya memperluas

partisipasi politik warga. Semakin luasnya keterlibatan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan sering kali memicu munculnya tuntutan terorganisir dari warga agar dapat ikut serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini terjadi karena warga menganggap bahwa monopoli kebijakan yang tidak implementatif dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan, sehingga mereka merasa perlu terlibat secara lebih aktif.

Morris Rosenberg (Damsar, 2010, hal. 191-192) menyatakan ada 3 (tiga) alasan kenapa orang bersifat apatis dalam aktivitas politik, yaitu :

- a. Partisipasi dalam aktivitas politik dianggap sebagai ancaman terhadap berbagai aspek kehidupan. Setiap keputusan di dalamnya pasti menyertakan biaya atau risiko. Dengan demikian, jika seseorang merasa bahwa terlibat dalam aktivitas politik akan membawa risiko bagi berbagai aspek kehidupannya, maka sikap apatis dianggap sebagai pilihan yang paling bijak untuk dirinya,
- b. Kegiatan politik dianggap sebagai suatu usaha yang tidak berarti. Cara individu menginterpretasikan realitas politik sebagai upaya yang memberikan manfaat atau sebaliknya, yakni sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai, akan memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam politik.
- c. Tanpa adanya dorongan atau insentif politik, yang juga dikenal sebagai "perangsang politik", individu tidak memiliki faktor untuk

mendorong diri mereka bertindak. Sebagai makhluk rasional, setiap individu menyadari apa yang diinginkannya. Jika seseorang percaya bahwa kegiatan politik tidak akan memenuhi kebutuhan material maupun immaterial mereka, maka tidak akan ada dorongan rasional atau faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas politik

### **C. Masyarakat Pesisir**

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas sendiri dan mendiami wilayah dan daerah-daerah tertentu. Dalam daerah-daerah tersebut mereka harus mengembangkan norma-norma yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Masyarakat memiliki sebuah interaksi yang terjadi di dalamnya dan membentuk sebuah sistem sosial (Fama, 2016). Durkheim (Soelaeman, 2012) mengatakan masyarakat merupakan asas solidaritas, memiliki perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkokoh oleh adanya pengalaman emosional. Masyarakat menampilkan aspek solidaritas organis dan aspek solidaritas mekanis. Solidaritas organis adalah hasil evolusi dari solidaritas mekanis, sedangkan solidaritas mekanis terjadi dalam masyarakat maksudnya yaitu adanya kesadaran kolektif, kepercayaan, sentimen ruang lingkup hukum yang menekan (refresif) dan komitmen moral.

Masyarakat dipandang sebagai sistem sosial, yaitu pola interaksi sosial yang terdiri atas komponen sosial yang teratur dan melembaga. Karakteristik sebuah sistem sosial, yaitu struktur sosial yang mencakup susunan status

dan peran yang ada disatuan sosial yang memunculkan nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur interaksi antar status dan peran sosial tersebut. Masyarakat selaku bagian dari struktur sosial dapat melakukan tindakan sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Jamaludin, 2015) sementara menurut Maclver, J.L. Gillin dan J.P. Gillin (Soelaeman, 2012) berpendapat bahwa masyarakat itu terbentuk adanya saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adatistiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Masyarakat pesisir yaitu masyarakat yang hidup didaerah pantai, yang mana sebagai masyarakat yang hidup dekat dengan wilayah perairan maka mata pencaharian mereka pada umumnya adalah nelayan. Sedangkan wilayah pesisir atau kampung nelayan yaitu permukiman yang letaknya tepat berada di bibir pantai, permukiman nelayan adalah perkampungan yang mendiami daerah kepulauan sepanjang pesisir termasuk danau dan sepanjang aliran sungai (Fama, 2016).

Masyarakat pesisir dimaksudkan adalah masyarakat yang tinggal didaerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemafaatan sumberdaya laut dan pesisir melalui kegiatan penangkapan dan budidaya (Derta & Endang , 2016). Masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir pantai di Indonesia dikenal sebagai kawasan

masyarakat miskin, kumuh dan terbelakang. Disamping itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, juga bertujuan untuk mendidikan agar nelayan lebih mandiri dan mempunyai kemampuan untuk hidup lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan berkelanjutan (Iswari, 2019).

#### D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan rujukan untuk memperkuat penelitian digunakan penelitian terdahulu sebagai bahan telaah lebih lanjut yang tergambar pada table berikut:

**Tabel 4**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama penulis dan tahun	Judul	Metode	Hasil penelitian
1	Regina Singestecia, Eko Handoyo, Noorocmat Isdaryanto (2018)	Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal	Kualitatif	Partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam beberapa bentuk- yaitu kegiatan diskusi politik informal dan pemberian suara. Bentuk partisipasi politik yang paling banyak dilakukan dengan pemberian suara pada Pilkada tahun 2014 mencapai 95,58%. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari kesadaran politik, pengaruh media massa, Pendidikan yang tinggi dan status sosial ekonomi,
2	Hasimu dan Achmad Abdi Amsir (2019)	Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan Di Desa Pulo Madu Kabupaten Kepulauan Selayar	Kualitatif	Masyarakat nelayan berinisiatif dalam ikut-serta pada pemilihan umum dengan tidak mengenal kata Golput, dikarenakan tuntutan beberapa hal seperti karena uang, harapan pada perbaikan hidup, karena keluarga atau karena untuk melunasi hutang. Pandangan dan sikap politiknya sangat ditentukan oleh fakta yang terjadi di lapangan sehingga

				wajah politik tergantung daripada perilaku para politikus.
3	Betrix Priscilla Fermamdez (2020)	Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020	Kualitatif	Factor-faktor yang mempengaruhi turunnya tingkat partisipasi politik masyarakat Timor Tengah Utara ialah sosial ekonomi, tingkat pengetahuan politik,serta faktor penghambat yang terdiri dari faktor internal dan eksternal.
4	Rahmawati, Syaifudin S. Kasim, Peribadi (2021)	Partisipasi Politik Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Studi Sosiologi Politik Pada Masyarakat Suku Bajo di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi)	Deskriptif kualitatif	Partisipasi politik terhadap pemilihan kepala daerah dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pengetahuan politik, faktor sosial ekonomi, pengaruh partai politik dan tim kampanye, pengaruh figur calon pilkada dan pengaruh <i>money politics</i> .Partisipasi politik seperti menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai, menjadi tim sukses salah satu pasangan calon dan lain sebagainya. Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik.
5	Swastiani Dunggjo, Iskandar N. Yantu (2021)	Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Di Tengah Pandemi Covid 19	Kualitatif	Partisipasi Politik Masyarakat sudah dapat dikatakan baik dimana Perilaku pemilih dipengaruhi oleh faktor daerah asal calon dalam pilkada di tahun 2020 hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh masyarakat. Selain faktor daerah asal calon, masyarakat melihat visi-misi yang disampaikan oleh pasangan calon.

Sumber : olahan peneliti, 2022

### E. Kerangka Konseptual

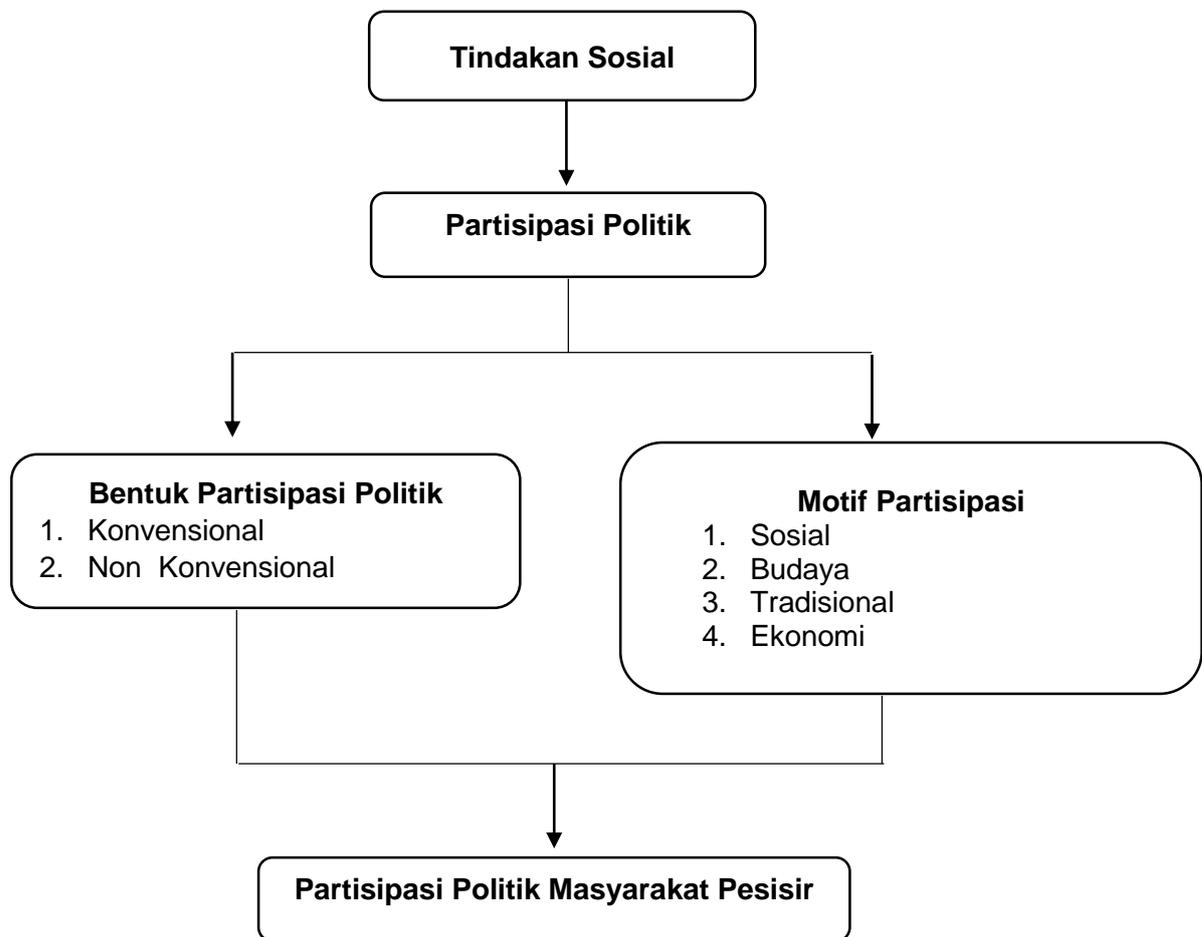
Pemilihan wali kota Makassar tahun 2020 sangat krusial dalam menentukan pemimpin yang pada rentang 2018 sampai 2020 dipimpin oleh pejabat sementara pasca kemenangan kotak kosong tahun 2017. Seyognya peningkatan partisipasi pemilih sangat penting melihat keterlibatan semua

stakeholder dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah yang serentak diadakan tahun 2020. Melihat angka partisipasi yang menurun antara tahun 2013 sampai tahun 2017 menjadi pekerjaan rumah bagi instansi terkait dalam meningkatkannya.

Pada penelitian ini akan dikaji lebih mendalam bentuk partisipasi politik konvensional yang mengacu pada bentuk partisipasi politik yang normal dan dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar serta tidak berupa kekerasan yaitu adanya pemungutan suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Hal itu yang terjadi di pemilihan wali kota Makassar, terkhusus di kecamatan sangkarrang yang membentuk tim sukses yang unsurnya dari partai politik maupun pasangan calon. Termasuk juga apakah bentuknya secara individual ataupun secara komunitas pemenang.

Dalam partisipasi politik yang dibangun masyarakat pesisir apakah bersumber dari tindakan sosial yang dalam konsep sosiologi tindakan itu merupakan tindakan perulangan yang disengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa, atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu yang pada akhirnya melahirkan motif baik rasional instrumental yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya atau tindakan rasional nilai hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan tujuannya sudah ada atau merupakan tindakan afektif yang lebih didominasi

perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar atau yang terakhir merupakan tindakan tradisional yang hanya memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Lalu apa yang menjadi motif politik yang mendorong partisipasi politik masyarakat pesisir. Apakah dilakukan karena faktor sosial, budaya, tradisional atau ekonomi sehingga kerangka konseptual penelitian ini adalah:



Gambar 2. Kerangka konseptual